



Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie (kedua kiri), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (kiri), dan akademisi bidang hukum Bintan R Saragih (ketiga kiri) mengucapkan sumpah jabatan pada pelantikan Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

ANWAR USMAN LANTIK TIGA ANGGOTA MKMK Netral dan Bebas Intervensi

JAKARTA (KR) - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melantik tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Anwar melantik Wahiduddin Adams dari unsur hakim konstitusi, Jimly Asshiddiqie dari unsur tokoh masyarakat, serta Bintan R. Saragih dari unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum.

Pelantikan tiga anggota MKMK tersebut untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XVI/2023. "Saya Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi," kata Anwar di Aula Gedung II MK, Jakarta, Selasa (24/10).

Ketiga anggota MKMK itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan MKMK Tahun 2023 tertanggal 23 Oktober 2023. Ketiganya akan bekerja selama satu bulan, mulai 24 Oktober hingga 24 November 2023.

Anwar Usman menyebut tiga anggota MKMK netral dan terbebas dari intervensi karena sudah disumpah sesuai kepercayaan masing-masing. "Enggak ada. Jadi begini, tadi sudah disumpah. Dengar, enggak, sumpahnya tadi?," tanyanya.

Anwar menjelaskan, ketiga anggota MKMK yang dilantik itu dipilih karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikenal dengan kredibilitas yang dimilikinya. "Memang ketentuannya seperti itu undang-undang yang berlaku sekarang dan ini orang-orang yang punya kredibilitas, semua orang juga tahu, lah," ujarnya.

* Bersambung hal 7 kol 1

Presiden Keluarkan Izin

Hari Ini Prabowo-Gibran Daftar ke KPU

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan persetujuan terhadap surat permohonan izin Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon

wakil presiden (cawapres) pendamping capres Prabowo Subianto. Pemberian izin Presiden Jokowi tersebut tertuang melalui surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 24

Oktober 2023.

"Presiden melalui surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 24 Oktober 2023 telah menyetujui permohonan izin Walikota Solo untuk diajukan se-

bagai cawapres oleh gabungan parpol," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24/10).

Surat persetujuan itu disam-

paikan setelah Gibran mengajukan surat permohonan kepada Presiden. "Persetujuan ini dikeluarkan sebagai jawaban permohonan Walikota Solo yang diajukan melalui surat

tertanggal 23 Oktober 2023," jelas Ari Dwipayana.

Ari mengatakan Gibran mengirim surat permohonan izin untuk dicalonkan oleh parpol

* Bersambung hal 7 kol 5

TAK ADA PERLAKUAN KHUSUS DI BARESKRIM Firli Diperiksa Tim Gabungan

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akhirnya bersedia diperiksa terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Hanya saja, pemeriksaan tidak dilakukan di Polda Metro Jaya, melainkan di Barekrim Polri, Selasa (24/10).

Firli diperkirakan tiba di Bareskrim Polri pukul 09.41 WIB, kedatangannya tidak terlihat oleh wartawan yang sudah berjaga-jaga di Bareskrim Polri sejak pagi. Sebuah mobil sedan Camry dengan nomor polisi B 1990 RFP terparkir di parkir belakang Gedung Rupatama Mabes Polri. Diduga Firli masuk ke Gedung Bareskrim lewat Rupatama.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan, Biro Hukum KPK ikut mendampingi Firli Bahuri dalam pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan Firli Bahuri di Bareskrim Polri sesuai permintaan dari KPK kepada penyidik Polda Metro Jaya dan kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.

Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri adalah penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri. Penanganan perkara ini tetap ditangani Polda Metro Jaya.

* Bersambung hal 7 kol 5

DEMOKRAT MASUK KABINET Presiden: Minggu Ini Reshuffle

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo menyatakan akan merombak (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada pekan ini, untuk melantik Menteri Pertanian definitif menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mundur karena tersangkut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

"Mungkin minggu ini," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (24/10).

Ditanya terkait pos Kementerian mana saja yang akan dirombak, Jokowi hanya mengatakan posisi Menteri Pertanian. Setelah Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri, jabatan Mentan kemudian dijabat oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi selaku Pelaksana Tugas (Plt).

Jokowi menambahkan pihaknya masih mempersiapkan perombakan kabinet tersebut, sehingga ia belum bisa memastikan kapan tepatnya perombakan itu ter-



KR-Antara/Muhammad Adhijaya
Agus Harimurti Yudhoyono

laksana. "Masih disiapkan," imbuhnya.

Ketika ditanya awak media apakah Mentan baru akan berasal dari Partai Demokrat, Jokowi tidak memberikan pernyataan. Presiden hanya menganggukkan kepalanya sembari berlalu meninggalkan kerumunan wartawan.

Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Jokowi dijadwalkan melantik pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10) hari ini. "Besok (Rabu) memang direncanakan ada pelantikan pejabat di Istana Negara," kata Ari.

Saat ditanya siapa pejabat yang akan dilantik dan dalam posisi apa, Ari akan menyampaikan perkembangan informasi tersebut. "Mengenai siapa yang dilantik dan dalam posisi apa, nanti saya akan update lagi," tambahnya.

* Bersambung hal 7 kol 5

DI BAWAH RP 2 MILIAR BEBAS PPN Pembelian Rumah MBR Dibantu Rp 4 Juta

JAKARTA (KR) - Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar hingga Juni 2024. Selain itu, pemerintah juga akan membantu biaya administratif sebesar Rp 4 juta untuk pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga 2024.

"Presiden meminta program PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar, ini berlaku PPN 100 persen ditanggung pemerintah sampai dengan Juni tahun depan," kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10).

Menurutnya, insentif pembebasan PPN itu berlaku hingga Juni 2024. Setelah Juni 2024, pemerintah akan menanggung 50 persen PPN rumah di bawah Rp 2 miliar. "Kedua insentif tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang mengalami kontraksi hingga 0,67 persen. Padahal, sektor perumahan dan juga konstruksi merupakan dua sektor ekonomi yang memberikan efek pengganda bagi subsektor ekonomi lainnya," papar Airlangga.

Sektor perumahan dan konstruksi memberikan kontribusi ke produk domestik bruto hingga 14 persen-16

* Bersambung hal 7 kol 1



Analisis 'Power Game' dan Demokrasi Bambang EC Widodo MA

PEMILU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, semakin menarik untuk diperhatikan. Dua pasangan calon sudah secara resmi mendaftar ke KPU, menyisakan kemungkinan satu pasangan calon lagi yang berpotensi untuk mendaftar sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan pertama yang mendaftar ke KPU merupakan pasangan calon yang didukung koalisi perubahan yang terdiri atas Partai NasDem, PKB dan PKS, serta beberapa partai lainnya. Pasangan Ganjar Pranowo dan Moh Mahfud MD sebagai pasangan yang mendaftar kedua didukung koalisi Partai PDI Perjuangan, PPP, Hanura,

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:26	14:35	17:36	18:47	03:55
Rabu, 25 Oktober 2023	Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY				

LAYANAN HOMECARE
Nikmati kemudahan dan kenyamanan layanan kesehatan dari tenaga medis terbaik kami tanpa perlu keluar rumah.

- Perawatan Luka
- Pasang & Lepas Sondes/NGT
- Pasang & Lepas Kateter
- Pasang & Lepas Infus
- Ibu Pasca Bersalin dan Bayi
- Memandikan Pasien

Pendataraan:
☎ 0811 2855 872 ☎ 0811 2822 303 (husus ibu & bayi)

PENYIMPANGAN PERAWATAN STADION SA

Bagus Nur Divonis 16 Bulan dan Denda Rp 50 Juta

YOGYA (KR) - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul, Bagus Nur Edi Wijaya, akhirnya divonis 1 tahun 4 bulan penjara, denda Rp 50 juta dan subsidi 1 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Yogya yang diketuai Tri Asnuri Herkuntanto, setelah sekitar 15 kali menjalani proses persidangan. Sidang digelar di Ruang Chandra PN Yogya.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Jangkung Guntoro, yakni 2 tahun penjara. Jangkung membenarkan, perkara tindak pidana korupsi tersebut sudah diputus Majelis Hakim PN Yogya Senin (23/10). Atas putusan tersebut terdakwa dan JPU me-



Sidang putusan kasus penyimpangan pengadaan barang dan jasa SSA Bantul di PN Yogyakarta.

nyatakan pikir-pikir.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Bagus tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, pasal 2 UU Tipikor. Oleh karena itu, Bagus bebas dari dakwaan primair. Tetapi, menurut hakim, Bagus terbukti secara sah

dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidi, pasal 3 UU Tipikor.

Oleh sebab itu, majelis hakim menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan serta denda Rp 50 juta dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Majelis Hakim juga memberikan pidana tambahan kepada terdakwa, yakni membayar uang pengganti sebesar Rp 165.367.985. Apabila tidak dibayarkan paling lama dalam waktu 1 bu-

lan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita JPU.

* Bersambung hal 7 kol 5

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● JUMAT 28 September 2023 selesai test semester, saya menunggu jemputan pulang sampai lama. Saya telepon bapak saya tidak aktif, telepon ibu saya tidak diangkat. Akhirnya saya naik ojek online. Sampai di rumah, ibu saya bertanya, "Tadi kamu kan naik sepeda?" Saya baru sadar kalau berangkat sekolah naik sepeda. (Halimah Nur Sabri, SMPN 2 Tempel, Banyurejo Tempel Sleman 55552) f